

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN WILAYAH OLEH CHINA DI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA MELALUI PELAKSANAAN LATIHAN PUNCAK ANGKASA YUDHA TNI AU TAHUN 2016

INDONESIA'S DEFENCE DIPLOMACY ON TACKLING BORDER-TRESPASSING ISSUES WITH CHINA AT THE NATUNA ISLAND WATERS THROUGH THE AIR FORCE'S ANGKASA YUDHA EXERCISE IN 2016

Wida Sanditya Kusuma¹, Mhd. Halkis², Purnomo Yusgiantoro³

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
(wida.sanditya@idu.ac.id)

Abstrak – Pasca insiden penangkapan kapal pencuri ikan nelayan China di perairan Kepulauan Natuna, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyampaikan pesan bahwa perairan Natuna adalah milik Indonesia yang sah dan berdaulat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Natuna pasca insiden tersebut adalah pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha yang diselenggarakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Latihan Puncak Angkasa Yudha adalah latihan rutin dan tertinggi yang dimiliki oleh TNI AU. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, tesis ini akan mengkaji tentang peran dan bentuk Diplomasi Pertahanan yang terkandung dalam pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha dalam rangka turut menciptakan pertahanan dan keamanan di kawasan perairan Natuna. Teori yang dipakai dalam tesis ini ialah teori kekuatan udara, teori deterensi non-nuklir, dan konsep diplomasi pertahanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Latihan Puncak Angkasa Yudha memiliki peran sebagai diplomasi pertahanan Indonesia dalam menjaga pertahanan dan keamanan perairan Natuna, serta adanya *deterrence effect* atau daya gentar yang berbentuk pengurangan angka pelanggaran batas wilayah hukum oleh China di wilayah tersebut sebagai bukti peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan peningkatan kepercayaan (*confidence building measures/CBMs*) sekaligus meningkatkan hubungan harmonis dengan negara China yang sempat tegang akibat insiden tersebut.

Kata kunci: China, *deterrence effect*, Diplomasi Pertahanan, Latihan Puncak Angkasa Yudha, Natuna

Abstract – After the incidents of Chinese illegal fishing boat arrests in the Natuna Islands waters, various attempts were made by the Indonesian government to convey the message that Natuna waters' sovereignty is owned legitimately by Indonesia. One of the activities carried out in Natuna after the incident was the Grand Exercise Angkasa Yudha which was organized by the Indonesian Air Force. Angkasa Yudha Exercise is the annual exercise and the highest form of exercise of Indonesian Air Force. This study uses qualitative research method and study case approach that will examine the role and forms of defense diplomacy contained in the exhibition of Angkasa Yudha Exercise. Theories used in this thesis are air power theory, deterrence theory (non-nuclear deterrence), and defense diplomacy concept. From this study, it could be concluded that Angkasa Yudha Exercise has a role as Indonesia's defense diplomacy in maintaining the defense and security of Natuna waters in terms of capacity building and confidence building measures (CBMs), also it gives deterrence effect in the form of reducing the number of Chinese's violations in the area, this effort also aims to increase harmonious relations with the once-tensed relation with China after the incident.

Keywords: Angkasa Yudha exercise, defense diplomacy, deterrent effect, China, Natuna

¹ Program Studi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan.

² Program Studi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan.

³ Universitas Pertahanan.

Pendahuluan

Hari Kamis, 23 Juni 2016, menjadi salah satu hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada hari tersebut, Presiden ke-7 Indonesia, Ir. Joko Widodo, memimpin rapat terbatas yang untuk pertama kalinya dilakukan di atas Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol 383. Hal ini terjadi setelah peristiwa penangkapan kapal ikan berbendera China di Laut Natuna pada 17 Juni 2016. Kapal ikan Quiongdanzhou 19038 terlihat oleh tim patroli TNI Angkatan Laut sedang menebar jala⁴⁴. Dilansir dari Kompas.com, menurut Laksmana Muda TNI A.Taufiq R. selaku Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat, para nelayan tersebut beralasan bahwa daerah tersebut adalah daerah melaut tradisional (traditional fishing ground). Namun pada kenyataannya, sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, daerah tersebut termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna yaitu sejauh 200 mil. Hal ini dianggap sebagai

ancaman terhadap kedaulatan dan juga sumber daya alam Indonesia.

Presiden Jokowi pun berangkat dari Pangkal Udara TNI AU Halim Perdanakusuma dan mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Ranai, Kepulauan Natuna. Tepat setelahnya, Presiden Jokowi berangkat menuju dermaga Penagi untuk naik KRI Imam Bonjol 383 yang sedang patroli di perairan Natuna. Rapat terbatas ini diikuti oleh para Menteri kabinet kerja, antara lain Menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan Luhut B. Pandjaitan, Menteri luar negeri Retno Marsudi, Sekretaris kabinet Pramono Anung, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), beserta sejumlah pejabat lainnya. Seperti yang tertera pada situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, tema utama agenda rapat yang direncanakan oleh Presiden Jokowi dan para Menteri yaitu Pengembangan Potensi Ekonomi Kepulauan Natuna⁵. Dilansir oleh situs

⁴ Kuwado, F. J. "Jokowi ke Natuna, Gelar Ratas di Kapal Perang Imam Bonjol." dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/23/07251731/jokowi.ke.natuna.gelar.ratas.di.kapal.per>

ang.imam.bonjol. 21 Juni 2016, diakses pada 17 Desember, 2017

⁵ "Kunjungi Natuna Presiden Jokowi Akan Pimpin Rapat Terbatas di Atas KRI Imam Bonjol" dalam <http://setkab.go.id/kunjungi-natuna-presiden->

berita BBC Indonesia juga, tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana menyebut bahwa rapat terbatas akan membahas sejumlah hal penting yang “berkaitan dengan perairan Natuna yang posisinya berbatasan langsung dengan Laut China Selatan”. Sekretaris Kabinet, seperti yang dilansir oleh Kompas pada 23 Juni 2016, juga menegaskan bahwa ada pesan kuat yang disampaikan dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna dan menggelar rapat terbatas di KRI Imam Bonjol 383 tersebut. “Natuna adalah wilayah NKRI. Itu sudah final. Maka dengan itu, sebagai kepala pemerintahan dan negara, Pak Jokowi ingin memastikan Natuna bagian dari kedaulatan NKRI.”

KRI Imam Bonjol 383 sendiri merupakan kapal perang yang pada pekan sebelumnya menembak kapal nelayan China di perairan Natuna, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Peristiwa penangkapan tersebut merupakan yang ketiga kalinya setelah terjadi pada Maret dan akhir Mei pada tahun yang sama. Kejadian penembakan bermula ketika pada 19 Maret 2016, ketika KM Kway Fey 10078 tertangkap di

perairan Natuna diduga menangkap ikan secara ilegal. Proses penangkapannya pun seolah dihalang-halangi oleh kapal penjaga pantai China (*Chinese coast guard naval ships*). Situs berita BBC melansir bahwa kapal penjaga pantai tersebut sengaja menabrak kapal pencuri ikan itu, yang menurut Menteri Susi, “agar rusak sehingga tidak dapat ditarik”. Kapal Pengawas Hiu 11 milik Indonesia sempat melepaskan tembakan peringatan, bahkan sebanyak tiga personel kapal pengawas juga sempat melompat ke dalam kapal ikan tersebut untuk mengawal. Namun sayangnya, kapal penjaga pantai Cina muncul dan menabrak kapal yang sudah menjadi target operasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut. (Penangkapan Kapal Ikan Asing Ilegal Cina di Natuna 'digagalkan', 2016) Pemerintah Tiongkok, menurut Menteri Susi, tidak berkenan kapalnya ditenggelamkan. Tidak kurang dari 4 bulan kemudian, KRI Imam Bonjol 383 menangkap kapal ikan Quiongdanzhou 19038 yang terdiri dari 7 awak kapal di Perairan Natuna. Laksmana Muda TNI A.Taufiq R. menyampaikan bahwa KRI Imam Bonjol pun

[jokowi-akan-pimpin-rapat-terbatas-di-atas-kri-imam-bonjol/](#) 23 Juni 2016, diakses pada 17 Desember, 2017.

melaksanakan Peran Tempur Bahaya Umum yang kemudian dilanjutkan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap KIA Quiongdanzhou 19038 berbendera China yang terdeteksi sedang menebar jala. Karena peringatan dari Indonesia tidak diindahkan oleh kapal penangkal ikan tersebut, KRI Imam Bonjol 383 pun akhirnya memberikan tembakan peringatan ke udara dan satu tembakan lainnya ke arah haluan kapal Quiongdanzhou.

Ketika akhirnya KRI Imam Bonjol berhasil mengawal kapal pencuri ikan itu ke pangkalan TNI AL, kapal *Coast Guard* China 3303 meminta agar kapal Quiongdanzhou dilepaskan. Namun tentu saja permintaan ini tidak digubris oleh pihak KRI Imam Bonjol 383. Namun, ternyata kapal *Coast Guard* China tetap membayangi tanpa tindakan berarti. Mereka kembali meminta agar kapal Quiongdanzhou untuk dilepaskan. Namun, tidak direspons oleh KRI Imam Bonjol. Kapal *Coast Guard* China baru menjauh dari konvoi ketika sudah mendekati daerah perairan teritorial Indonesia.

Berulangnya kejadian penangkapan kapal ilegal dari China ini

menunjukkan bahwa dengan penangkapan yang sebelumnya, para nelayan China tidak juga jera untuk melakukan aksinya. Pun dengan reaksi pemerintahnya yang seolah-olah melindungi dengan cara menemani/menyokong kapal nelayan mereka dengan kapal penjaga pantai (*coast guards*). Pemerintah China tampak tidak terima dengan penangkapan dan peledakan kapal nelayannya yang sudah melanggar kedaulatan Indonesia dengan melakukan tindakan penangkapan ikan ilegal. Padahal hal ini sudah menjadi kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak Menteri Susi menjabat pada tahun 2014. Kebijakan penenggelman kapal pencuri ikan diatur dalam Undang-Undang (UU) no. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Di dalam UU No.45 tahun 2009 pasal 65 ayat (4) tertera bahwa, penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁶ Semenjak tahun 2014, kebijakan terobosan Menteri Susi ini memang menjadi momok tersendiri bagi

⁶ “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan” dalam

<https://jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-2009-45.pdf>
2010, diakses pada 17 Desember, 2017.

para penangkap ikan ilegal yang biasa beroperasi di perairan Indonesia. Namun, tampaknya, meskipun ada kebijakan yang bersifat menangkal (*deterrence*) ini, nelayan dari negara China khususnya tidak gentar sama sekali, sehingga masih berani untuk melaksanakan pencurian ikan di wilayah Kepulauan Natuna. Bahkan, pihak pemerintah China pun berdalih dengan mengatakan bahwa wilayah perairan Natuna masih termasuk ke dalam wilayah kebiasaan melaut tradisional mereka (*traditional fishing ground*), padahal jelas-jelas wilayah perairan Natuna sejauh 200 mil dari daratan adalah wilayah ZEE Indonesia, yang berarti wilayah kedaulatan sah Indonesia. Hal ini juga sebenarnya bagian dari ambisi China untuk mengklaim perairan di sekitar wilayah Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya yang dirangkum dalam *Nine-Dashed Lines* atau Sembilan Garis Putus-putus. Meskipun Indonesia tidak termasuk sebagai negara non-klaiman atas sengketa di Laut China Selatan, tentu saja Indonesia tidak bisa tinggal diam ketika wilayah kedaulatannya terancam oleh negara lain.

Tidak lama setelah kasus penangkapan ikan ilegal oleh nelayan China, tepat pada bulan Oktober 2016,

Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU dilaksanakan di Kepulauan Natuna. Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU adalah latihan rutin tertinggi TNI AU yang ditujukan untuk mengukur kemampuan dan kekuatan satuan TNI AU secara berjenjang, mulai dari tingkat perseorangan, satuan, antarsatuan, hingga tingkat Komando Utama (Kotama). Bertindak sebagai Direktur Latihan (Dirlat) Angkasa Yudha 2016 yaitu Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Yuyu Sutisna, S.E. Latihan ini meliputi simulasi skenario taktik dan operasi serangan terbaru untuk menghadapi serangan musuh. Di antaranya taktik penyerangan dengan menggunakan paket pesawat tempur, taktik penghadangan pesawat musuh, membungkam pertahanan udara musuh, dan pengeboman musuh dengan semua pesawat tempur. Latihan Puncak Angkasa Yudha ditujukan untuk meningkatkan daya tempur (*combat capability*) pada operasi udara, baik secara mandiri maupun operasi gabungan. Hal ini sesuai dengan Tugas Pokok TNI AU Pasal 10 UU No.34 Tahun 2014 tentang TNI;

“Angkatan Udara bertugas: a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan; b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah

udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.”

Dilihat dari tugas pokok ini sesungguhnya tidak bersentuhan dengan masalah kelautan. Namun, dalam sistem pertahanan sesungguhnya tidak bisa dipisah-pisahkan, untuk itu penting diteliti bisakah TNI AU terlibat secara mandiri dalam pengamanan laut. Latihan Puncak Angkasa Yudha 2016 melibatkan puluhan jenis pesawat tempur, pesawat angkut, intai, helikopter dan juga pesawat terbang tanpa awak (PTTA). Latihan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo, beserta para menteri kabinet kerja, yaitu Menteri Koordinator politik, hukum, dan keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan para Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU), beserta para pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga bersama

tokoh masyarakat setempat. Para pejabat di atas ikut menyaksikan jalannya operasi udara yang diperagakan dalam bentuk Operasi Seragan Udara Strategis (OSUS), Operasi Lawan Udara Ofensif (OLUO) serta Operasi Dukungan Udara (Dukud) berupa Serangan Udara Langsung (SUL) dan Bantuan Tembakan Udara (BTU), SAR tempur serta penerjunan statik. Presiden Joko Widodo juga sebelumnya meninjau *static show* pesawat dan aneka persenjataan udara. Presiden bahkan sempat menjajal duduk di *cockpit* pesawat tempur Sukhoi. Setelahnya, Presiden juga disematkan wing penerbang kehormatan kelas satu oleh Kepala Staf TNI AU (KASAU) Marsekal TNI Agus Supriatna.⁷

Pada awalnya Latihan Puncak Angkasa Yudha 2016 hendak digelar di *Air Weapon Range Building*, Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung pada 29 September. Namun, terjadi perubahan rencana karena diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk dipindahkan ke pulau Natuna. Dikutip dari situs Belitong Ekspres, Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud HAS Hanandjoeddin,

⁷ Wibowo, L. S. “Latihan TNI AU Angkasa Yudha '16 Bukan Unjuk Kekuatan Militer.” *Majalah*

Kedirgantaraan Angkatan Udara Suara Angkasa edisi Oktober, 2016, p. 2-7.

Kapten Sus Andi Bangsawan, dengan seizin Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) HAS Hanandjoeddin Letkol Pnb Anang Heru Setiyono membenarkan berita pemindahan tersebut.⁸

Menurut beliau, selain untuk mendukung agenda nasional “Sail Karimata 2016”, pemindahan latihan Angkasa Yudha ke Natuna juga bertujuan untuk memberikan *shock therapy* kepada sejumlah kepentingan jahat di wilayah Natuna. Kapten Sus Andi Bangsawan mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia ingin menunjukkan kehebatan Tentara Nasional Indonesia kepada para perompak di lautan agar tidak mengganggu nelayan Indonesia yang melintasi wilayah perairan Natuna.

Kepulauan Natuna adalah salah satu pulau terluar Indonesia di bagian utara yang berada di tengah Laut China Selatan dan mengingat lokasinya yang dekat dengan daerah potensi konflik Laut China Selatan, bukan tidak mungkin jika suatu saat konflik Laut China Selatan pecah menjadi perang terbuka antar negara dalam memperebutkan wilayah tersebut, Kepulauan Natuna juga akan terkena imbasnya. Maneuver Latihan Tempur atau Latihan Puncak Angkasa

Yudha TNI AU yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2016 menurut penulis adalah salah satu upaya strategis sebagai *deterrence effect* atau daya tangkal terhadap ancaman konflik dan krisis kedaulatan wilayah daerah terluar terkait dengan ketegangan di Laut China Selatan. Dengan diadakannya latihan tempur yang bahkan disaksikan oleh Presiden, Panglima TNI, Menteri Polhukam dan Menlu, diharapkan menciptakan daya tangkal yang baik agar Tiongkok sebagai agresor di Laut China Selatan tidak serta-merta mengklaim ZEE perairan Natuna yang bersinggungan sedikit pada *Nine-Dashed Lines*. Penelitian ini akan meninjau bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia pada Latihan Puncak Angkasa Yudha di Kepulauan Natuna terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China di wilayah perairan Natuna. Dalam konteks ini, peneliti akan menitikberatkan apakah pasca penyelenggaraan Latihan Puncak Angkasa Yudha di Kepulauan Natuna, pelanggaran-pelanggaran wilayah yang terjadi di perbatasan Kepulauan Natuna berkurang atau tidak sebagai bentuk efektivitas efek daya gentar (*deterrence effect*) yang diberikan Latihan Puncak Angkasa Yudha.

⁸ “Latihan Angkasa Yuda Geser ke Natuna” dalam <https://belitongekspres.co.id/latihan-angkasa->

[yuda-geser-ke-natuna](https://belitongekspres.co.id/latihan-angkasa-) 26 September 2016, diakses pada 17 Desember, 2017.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dampak pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha, kemudian dapat diketahui dampak latihan terhadap pelanggaran wilayah terhadap kawasan serta meninjau latihan dari kacamata Diplomasi Pertahanan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan kajian serta evaluasi kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait (*stakeholders*), terutama dari pihak militer, TNI AU khususnya, dalam memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif. Menurut McNabb di dalam bukunya Metode Penelitian untuk Ilmu Politik, istilah penelitian kualitatif dipakai untuk menjelaskan serangkaian teknik pertanyaan non-statistik dan berbagai proses yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang fenomena sosial.⁹ Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisa secara mendalam objek penelitian dengan teori dan konsep yang digunakan. Peneliti juga menganalisis inti permasalahan dan fenomena yang diteliti

dan kemudian memberikan rekomendasi pemikiran berupa temuan atau hasil penelitian terhadap masalah yang diteliti.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu fenomena yang diteliti, yaitu Diplomasi Pertahanan Indonesia melalui Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU terhadap pelanggaran wilayah oleh China di perairan Kepulauan Natuna tahun 2016. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dengan cara mengamati fenomena tentang fokus penelitian, wawancara untuk mengumpulkan keterangan lisan dengan cara bertanya langsung kepada informan berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, dan studi literatur untuk mengumpulkan data yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini di antaranya adalah Perwira Bantuan Madya (Pabandya) Operasi Markas Besar TNI AU, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan/atau Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

⁹ McNabb, D. E.. *Research Methods for Political Science*. 2010. New York: M.E. Sharpe Inc.

Perikanan (PSDKP), Direktorat Kerjasama Internasional (Ditkersin), dan Lembaga pemikir strategis/*think-tank*: The Habibie Center. Selanjutnya, untuk sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur, jurnal, artikel, serta situs di internet yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Pembahasan

Peran Latihan Puncak Angkasa Yudha sebagai Instrumen Diplomasi Pertahanan Indonesia di Kepulauan Natuna

Lokasi Kepulauan Natuna yang terletak dekat dengan Laut China Selatan yang sedang mengalami konflik antara negara-negara ASEAN dan China. Walaupun Indonesia mengaku bahwa tidak menjadi negara klaiman di sana, akan tetapi, pada kenyataannya wilayah ZEE laut kepulauan Natuna diklaim oleh negara China yang termasuk ke dalam nine-dash line. *Nine-dashed lines* adalah klaim dari negara China yang mengatakan bahwa daerah yang melingkupi 9 garis putus-putus yang berpusat di sekitar Kepulauan Spratly adalah termasuk wilayah tradisional menangkap ikan China (*traditional fishing ground*), sehingga China merasa memiliki wilayah perairan Laut China Selatan tersebut. dan pembangunan basis militer di atas daerah karang Scarborough

(Scarborough Shoal). Nine-dash line dibuat oleh China dengan ambisi menghidupkan kembali Jalur Sutra Maritim atau Maritime Silk Road yang membentang dari Asia Tenggara hingga ke daratan Eropa.

Adapun beberapa *Point statement* dari Kementerian Luar Negeri atas persoalan 9 *dash lines* sebagai bentuk sikap dari Indonesia adalah:

1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan pemerintah Republik Rakyat China tak pernah menjelaskan apapun soal *nine-dashed lines*, yakni garis imajiner yang digunakan China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.
2. *Nine-dashed lines* China tiba-tiba masuk merusuk ke wilayah ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia. Atas latar belakang ini muncul persoalan antara Indonesia dengan China (Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI).
3. Indonesia pertama kali tahu soal *nine-dashed lines* 23 tahun lalu yaitu pada tahun 1993, pada *Workshop On Managing Potential Conflicts In The*

South China Sea. Kala itu delegasi china mendistribusikan satu peta yang di dalamnya tercantum *nine-dashed lines* menjorok hingga perairan Natuna.

Mengapa kemudian Laut China Selatan menjadi perebutan oleh negara China serta beberapa negara ASEAN (Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam) dan bahkan Taiwan? Tertuang dalam tulisan “Implementasi Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Agresifitas China di Laut China Selatan Guna Mendukung Pembangunan Pertahanan Republik Indonesia” oleh Akhmad Hanan (2018)¹⁰, bahwa sumber daya alam di sekitar Laut China Selatan sangatlah kaya, di antaranya:

- a. Laut China Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam khususnya minyak bumi dan gas alam yang terbesar kedua setelah Teluk Persia. Dalam kurun waktu 1984 sampai dengan 1986, *South China Sea Oceanography Institute* dari *China Academy of Science* melakukan survey multidisiplin di Kepulauan Spratly, China, memperkirakan potensi sumber daya alam minyak di Laut China Selatan

sebesar 213 miliar barel (bbl) sementara *United States Geological Survey (USGS)* pada tahun 1993 hingga 1994 memperkirakan total kandungan minyak bumi sebesar 28 miliar bbl. Hasil ini menunjukkan bahwa Kepulauan Spratly dan Paracel memiliki kandungan minyak yang sangat besar sekitar 105 miliar bbl (yang belum dieksplorasi).

Dengan begitu kayanya kandungan kekayaan sumber daya alam yang terdapat di sekitar Laut China Selatan, termasuk pula perairan Natuna, maka tidak heran jika daerah tersebut sampai diperebutkan banyak negara. Belum lagi daerah tersebut juga termasuk jalur lintas perdagangan internasional. Hal tersebut semakin menambah kompleks masalah, karena apabila daerah tersebut dikuasai oleh satu negara saja, maka kestabilan kawasan tersebut tentu akan terganggu.

Seperti yang kita tahu, Kepulauan Natuna adalah salah satu pulau terluar Indonesia di bagian utara yang berada di tengah Laut China Selatan dan mengingat lokasinya yang dekat

¹⁰ Akhmad Hanan. “Implementasi Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Agresifitas China di Laut China Selatan Guna Mendukung

Pembangunan Pertahanan Republik Indonesia.” 11 November 2018.

dengan daerah potensi konflik Laut China Selatan, bukan tidak mungkin jika suatu saat konflik Laut China Selatan pecah menjadi perang terbuka antar negara dalam memperebutkan wilayah tersebut, Kepulauan Natuna juga akan terkena imbasnya. Pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2016 adalah salah satu upaya strategis dan termasuk sebagai *deterrent effect* atau daya tangkal terhadap ancaman konflik dan krisis kedaulatan wilayah daerah terluar terkait dengan ketegangan di Laut China Selatan.

Dengan diadakannya latihan tempur yang bahkan disaksikan oleh Presiden, Panglima TNI, Menteri Polhukam dan Menlu, diharapkan menciptakan daya tangkal/efek gentar agar China sebagai agresor di Laut China Selatan tidak serta-merta mengklaim perairan Natuna yang bersinggungan pada *Nine Dash Line*. Efek gentar ini dapat dianggap sebagai bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam menciptakan keamanan di kawasan rawan konflik tersebut.

Bentuk *deterrent effect* Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China di Perairan Kepulauan Natuna

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diwakili oleh Bapak Sahono Budianto, S.St.Pi., M.Si. dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), bahwa terdapat pengurangan angka pelanggaran pencurian ikan secara ilegal (*IUU Fishing*) secara signifikan di wilayah perairan Indonesia pasca pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU di Kepulauan Natuna pada tahun 2016 lalu.

Tabel 1. Data Jumlah Pelanggaran

NEGARA	TAHUN					JUMLAH PELANGGARAN
	2014	2015	2016	2017	2018	
Indonesia	22	48	23	47	68	201
Vietnam	9	36	83	68	29	225
Filipina	0	8	29	5	5	47
Malaysia	0	10	26	11	7	54
Thailand	7	0	1	0	0	8
China	0	0	1	0	0	1
Timor Leste	0	0	0	1	0	1
Total	38	102	163	132	109	544

Sumber: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), 2019

Meskipun perbedaan anggaran pertahanan yang sangat timpang, Indonesia tetap berusaha membangun postur pertahanannya. Terutama di wilayah perbatasan. Adapun detail tentang rencana pembangunan militer di Natuna, sebagai berikut:

- a. Pembangunan pangkalan militer di Natuna penting untuk menjaga sumber daya alam di kawasan itu. Tak cuma di Natuna, pangkalan militer akan dibangun di wilayah-wilayah lain yang berada di garis terluar perbatasan Indonesia,
 - b. Pangkalan militer di Natuna akan dilengkapi tiga kapal perang TNI Angkatan Laut, kapal selam, satu pesawat tempur, radar, dan *drone* penangkis serangan udara. Pelabuhan di Natuna juga akan diperbaiki, sedangkan landasan pacunya diperlebar untuk tempat mendarat pesawat tempur,
 - c. Dari segi penguatan personel, dalam perkembangannya satu kompi marinir dan satu kompi korps Korps Pasukan Khas (Paskhas) TNI Angkatan Udara. Satu kompi Paskhas terdiri dari 150 sampai 200 personel. Satuan ini memiliki kemampuan tempur darat, laut, dan udara sekaligus,
 - d. Sementara TNI Angkatan Darat di Natuna akan dilengkapi dengan satu Batalyon Raider yang merupakan salah satu pasukan *elite* TNI,
 - e. TNI AL di Natuna sudah dilengkapi sejumlah armada perang untuk kekuatan perang KRI secara rutin beroperasi di perairan ZEE Indonesia. Bahkan akan didukung pasukan gabungan dari seluruh satuan TNI AL (komposit) sekitar 205 personel ditambah prajurit Lanal,
 - f. Kekuatan TNI AL di Natuna, saat ini sudah didukung infrastruktur pertahanan laut. Di antaranya Markas Lanal, Kompi Komposit TNI AL, Posal-posal hingga pelabuhan sandar KRI, pelabuhan pendaratan pasukan serta pelabuhan pangkalan kapal selam (target tahun 2018 selesai).
- Pemerintah Indonesia telah mengumumkan strategi pertahanan baru yang berfokus pada tiga prioritas, yaitu menjadi titik tumpu global maritim (*Global Maritime Fulcrum*), memenuhi target *minimum essential forces* (MEF) dan menjalankan program pertahanan negara selama 10 tahun ke depan. Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan dilakukan melalui:
- a. Pertama, pengintegrasian peran & fungsi kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dengan memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan

(BNPP) dalam melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan secara terpadu; dan

- b. Kedua, optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral maupun multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah perbatasan secara damai Bersama negara-negara tetangga.

Dengan fakta-fakta lapangan ini membuktikan bahwa Latihan Puncak Angkasa Yudha ini merupakan instrumen Diplomasi Pertahanan yang efektif untuk memberikan efek jera (*deterrence*) bagi para pelanggar wilayah di wilayah perairan Kepulauan Natuna, terutama oleh negara China. Dengan kehadiran kekuatan di perbatasan menjadi suatu simbol kehadiran negara (*state presence*) untuk menyampaikan pesan bahwa bahkan di perbatasan sekali pun, negara Indonesia tetap mengencangkan ikat pinggangnya dan tidak akan gentar ataupun mundur dalam upaya penegakan kedaulatan. Di Kepulauan Natuna sendiri, peningkatan kapabilitas pun telah dilaksanakan, contohnya penambahan panjang *runway* bandara Ranai yang dapat digunakan untuk menampung

pesawat F-16 yang diletakkan di Lanud Roesmin Nurjadin yang terletak di provinsi tetangga, provinsi Riau. Sehingga apabila terdapat ancaman-ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi, pesawat F-16 dapat segera didatangkan ke Kepulauan Natuna. Hal ini tentu memberikan efek *deterrence* yang nyata di kawasan Kepulauan Natuna.

Tujuan dilaksanakannya latihan militer selain untuk unjuk kekuatan (*show of force*), bertujuan untuk mengukur kapabilitas personil. Dalam perspektif Diplomasi Pertahanan hal ini dipandang sebagai *Capacity Building* atau pembangunan kekuatan militer. Pasca pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha, Panglima Gatot Nurmantyo menekankan bahwa pelaksanaan Latihan Angkasa Yudha di Natuna bukanlah suatu usaha untuk unjuk kekuatan atau *show of force* melainkan hanya sebagai latihan rutin. Namun dilansir dari The Strait Times, beliau mengatakan bahwa akan menganggap sebagai pujian apabila hal tersebut dianggap sebagai *show of force*. Panglima TNI juga memastikan bahwa upaya di Natuna tersebut tidak dimaksudkan untuk menanggapi ketegangan dengan pemerintah China terkait dengan konflik di Laut China

Selatan, melainkan untuk menjaga keutuhan Negara Indonesia secara keseluruhan.¹¹

Namun, menurut beberapa pengamat kawasan, kegiatan ini tergolong suatu upaya Diplomasi Pertahanan oleh Indonesia. Adapun menurut Iis Gindarsah seperti yang dilansir oleh *The Strait Times*, pelaksanaan latihan tempur tentara di perbatasan adalah suatu hal yang lumrah dan hal ini dikenal sebagai salah satu kegiatan diplomasi pertahanan. Dimana hal ini diharapkan memberikan efek *deterrent* atau daya tangkal bagi pihak-pihak yang hendak melakukan hal yang mengancam kedaulatan negara di wilayah perbatasan.¹²

Menurut Gregory Winger dalam tulisannya *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy* (2014), bahwa Diplomasi Pertahanan adalah tentang penggunaan instrumen-instrumen pertahanan (personil militer contohnya) di masa damai untuk berbagai kegiatan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Winger menekankan pada penggunaan *soft power* bukan *hard*

power untuk menyampaikan maksud dari negara asal. Terkait dengan penggunaan *soft power* pada praktek diplomasi pertahanan yang ditekankan adalah pada *co-option* atau opsi bersama, yakni yang diumpamakan Winger saat Negara B melakukan apa yang Negara A mau karena negara B yakin bahwa pilihan yang diberikan A yang terbaik. Pada kasus ini terlihat bahwa China diyakinkan oleh Indonesia melalui instrumen militernya (Latihan Angkasa Yudha) untuk menghentikan sikap invasifnya di Perairan Natuna. Hal ini untuk menjaga hubungan baik kedua negara itu sendiri.

Sesuai dengan teori yang diajukan oleh Winger, bahwa diplomasi pertahanan adalah penggunaan instrumen militer dalam masa damai untuk memajukan kepentingan nasional suatu negara. Jika menurut Cottey & Foster diplomasi pertahanan penggunaan instrumen militer yang diutamakan dengan konsep membangun kerjasama militer (*confidence building measure*), peningkatan kapabilitas (*capacity building*) dan industri pertahanan (*defense industries*), maka Winger menekankan bahwa ketika instrumen

¹¹ Belitong, *op.cit.*, hlm. 7.

¹² Wahyudi Soeriaatmadja. "No Joint War Games in South China Sea" dalam

<https://www.straitstimes.com/asia/no-joint-war-games-in-south-china-sea>. 16 Oktober 2016, diakses pada 17 Desember, 2017.

militer atau pertahanan dipakai untuk membantu negara dalam pencapaian kepentingan nasional terutama dengan negara lain ataupun untuk perpanjangan tangan negara di dalam atau pun luar negeri, di sinilah diplomasi pertahanan juga bermain.

Adapun dengan hak-hak yang dimiliki Indonesia di wilayah ZEE perairan Natuna sendiri, dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dituliskan bahwa: *“In the exclusive economic zone, the coastal state has sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting...”*. Dalam artikel ‘Sovereignty’ versus ‘Sovereign Rights’ yang tulis Jean Christou pada laman *CyprusMailOnline.com*, menurut UN Special Adviser, Espen Barth Eide, bahwa memang hak negara di wilayah ZEE ada suatu kebingungan di dalamnya. Menurutnya *sovereignty* (kedaulatan) dan *sovereign rights* (hak berdaulat) di wilayah ZEE berbeda. *Sovereignty* (kedaulatan) suatu negara berada di wilayah 12 mil dari landas kontinen, di sini negara memiliki kedaulatan penuh akan segala aktivitas dan eksplorasi baik eksploitasi sumber daya alam. Akan

tetapi, *sovereign rights* (hak berdaulat) suatu negara adalah yang terletak pada 200 mil atau yang sering dikenal sebagai zona ekonomi eksklusif. Menurut Eide, karena zona ekonomi bukan merupakan wilayah kedaulatan, siapapun dapat melaksanakan kegiatan apapun di daerah tersebut untuk mengambil sumber bdaya. Tetapi hal itu merupakan isu teknis. Hal tersebut sering sekali menjadi pelanggaran, apalagi jika terjadi eksploitasi.¹³

Sedangkan menurut UNCLOS sendiri, *“coastal states may however in their discretion withhold their consent to the conduct of a marine scientific research project of another state or competent international organisation in the exclusive economic zone or on the continental shelf of the coastal state if that project: (a) is of direct significance for the exploration and exploitation of natural resources, whether living or non-living.”* Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan/pesisir memiliki hak eksklusif yang dijamin oleh UNCLOS untuk mengatur kegiatan di wilayah ZEE itu sendiri. Terutama jika terjadi kegiatan pelanggaran berupa pencurian ikan ilegal.

¹³ Christou, J. *“‘Sovereignty’ versus ‘sovereign rights’”* dalam <https://cyprus-mail.com/2015/04/08/sovereignty-versus->

[sovereign-rights/](https://cyprus-mail.com/2015/04/08/sovereignty-versus-sovereign-rights/). 8 April 2015, diakses pada 17 Desember, 2017.

Dalam pelaksanaan Angkasa Yudha sendiri, dapat dilihat bagaimana instrumen militer, dalam hal ini Latihan Angkasa Yudha TNI AU dimaksudkan pelaksanaannya sebagai penyampaian pesan dari Indonesia terhadap China untuk menghentikan pelanggaran di wilayah perairan Natuna. Latihan Angkasa Yudha di Natuna di sini berperan sebagai instrumen diplomasi pertahanan Indonesia untuk menyampaikan pesan kepada China dalam rangka mencapai kepentingan nasional Indonesia di perairan Natuna untuk menjaga hak kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) secara utuh di wilayah perbatasan tersebut.

Bentuk *deterrence effect* pasca pelaksanaan Latihan Angkasa Yudha terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China

Dalam pasal 19 dalam buku Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa dijelaskan bahwa peran dari kekuatan udara pada hakikatnya merupakan aplikasi kemampuan kekuatan udara sebagai suatu kekuatan militer yang dimanifestasikan pada kemampuan Angkatan Udara dalam

menyelenggarakan penegakan kedaulatan negara dan hukum di udara, mengelola krisis internasional, dan memelihara perdamaian serta sebagai alat penyelenggara dukungan sosial. Kemudian, pada butir c dijelaskan bahwa kekuatan udara berperan sebagai ‘alat penyelenggara pencegah krisis nasional, regional, dan internasional’ yang dipaparkan ke dalam 6 poin lanjutan:

- 1) Peringatan. Kekuatan udara berperan untuk memberikan peringatan pada saat yang tepat tentang agresi yang mungkin akan dilakukan oleh musuh.
- 2) Isyarat. Kekuatan udara berperan untuk mengirimkan isyarat politik yang jelas melalui berbagai tindakan, termasuk peningkatan kesiapan secara terbuka, pelatihan, atau penerbangan.
- 3) Dukungan. Kekuatan udara berperan untuk memberikan dukungan moril dan fisik kepada kawan, sehingga memperkuat semangat pada saat moril menurun.
- 4) Pertolongan. Kekuatan udara berperan untuk melakukan operasi pertolongan dalam situasi krisis.
- 5) Peningkatan stabilitas. Kekuatan udara berperan untuk menambah kekuatan lain di wilayah yang

terancam huru-hara atau konflik regional, sehingga stabilitas keamanan dapat ditingkatkan.

- 6) Penangkalan. Kekuatan udara berperan sebagai kekuatan penangkalan melalui penggelaran alutsista udara.

Pada poin 3, 4, serta 6 merupakan esensi dari bentuk *deterrence* yang ada dalam tubuh Angkatan Udara itu sendiri. Pada poin 3, yaitu Dukungan, bahwa kekuatan udara berperan memberikan dukungan moril dan fisik kepada kawan, sehingga memperkuat semangat pada saat moril menurun. Jika diaplikasikan pada kasus pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha di Natuna tahun 2016 ini adalah bahwa pelaksanaan latihan tersebut adalah bentuk dukungan kepada rekan sesama TNI, yaitu TNI AL dalam melaksanakan usaha pengamanan laut. Mengawasi dan menangkap pelanggaran yang terjadi di laut sejatinya adalah *domain* TNI AL, namun karena pada tahun 2016 tersebut terjadi salah satu insiden besar yang cukup mengganggu stabilitas kawasan Natuna, TNI AU turut mendukung TNI AL untuk memberikan *deterrence* terhadap China di kawasan tersebut dengan melaksanakan latihan puncak Angkasa Yudha.

Pada poin pertolongan, yaitu bantuan udara pada saat situasi krisis. Situasi kawasan perairan Natuna pasca terjadi insiden menjadi krisis dan cukup tegang. Di sini peran Angkatan Udara juga dibutuhkan untuk memberi pertolongan, contohnya berupa bantuan penguatan armada untuk *air-surveillance* untuk mengintai perairan Natuna agar terbebas dari kapal-kapal penangkap ikan ilegal. Dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, Bapak Sahono Budianto menyatakan bahwa KKP juga bekerjasama dengan pihak TNI AU dalam pelaksanaan *air-surveillance*, yaitu untuk menangkap gambar atau foto kapal-kapal asing yang sedang berada di wilayah perairan Natuna. Selanjutnya, gambar tersebut akan diteruskan ke instansi terkait, contohnya Bakamla atau Polisi Air untuk ditindaklanjuti. Pada poin 6 juga jelas tertera bahwa peran kekuatan udara dalam doktrin TNI AU adalah sebagai upaya ‘penangkalan’ atau sebagai deterensi. Penulis ingin menunjukkan bahwa Latihan Puncak Angkasa Yudha adalah merupakan salah satu wujud penerapan kekuatan udara TNI AU di wilayah Kepulauan Natuna yang berperan untuk menangkal segala niat negatif dari lawan, maupun juga sebagai alat pencegah konflik.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa menurut Mayor Wee, dalam konteks deterensi non-nuklir, pihak-pihak yang memiliki kekurangan baik secara geografis atau angka cenderung untuk melakukan upaya yang lebih banyak serta anggaran yang lebih besar untuk membangun kekuatan deterensi yang mumpuni. Contohnya adalah Singapura dan Korea Selatan. Akan tetapi, beliau juga menulis bahwa bertumpu pada kekuatan militer saja tidaklah cukup untuk mencegah agresi, serta mempertahankan kedaulatan negara-negara non-nuklir ini. Deterensi konvensional harus didukung oleh diplomasi, aliansi politik, kerjasama ekonomi untuk menjadi lebih efektif dalam menangkal agresor.¹⁴ Dalam tesis ini, yang menjadi upaya deterensi dari Indonesia untuk membuat China jera dalam melakukan pelanggaran, adalah Latihan Angkasa Yudha dan juga pembangunan kapabilitas militer di wilayah Natuna. Bahwa dengan melaksanakan Latihan Angkasa Yudha di wilayah Natuna dan pembangunan kapabilitas militer di Natuna

menyampaikan pesan bahwa Indonesia siap dengan kapabilitas militernya apabila sewaktu-waktu ada serangan militer atau invasi di wilayah Natuna. Meskipun apabila dibandingkan kekuatan militer Natuna dengan Indonesia memang jauh tertinggal, tetapi dengan melakukan Latihan Puncak Angkasa Yudha menunjukkan keseriusan Indonesia untuk melindungi wilayah kedaulatan Indonesia dan komitmen negara untuk hadir di perbatasan. Inilah salah satu deterensi paling efektif yaitu kehadiran negara di perbatasan dalam bentuk pembangunan kapabilitas militer.

Hal ini didukung oleh pendapat dari Profesor Indria Samego pula dalam wawancaranya dengan Majalah Suara Angkasa TNI AU edisi Oktober 2016, terkait sikap Indonesia terhadap konflik Laut China Selatan dan juga sikap ekspansif China yang mengklaim ZEE wilayah perairan Natuna, yang harusnya menjadi sorotan adalah bagaimana Indonesia bisa mengelola *pressure* atau tekanan permasalahan dengan menekankan hubungan diplomasi, selain penguatan alutsista. Menurut beliau,

¹⁴ Peow, M. W. "The Viability of Deterrence Strategies by Non-Nuclear States." *Pointer - Journal of the Singapore Armed Forces*, Vol. 40, hlm. 1-7. dalam <https://www.mindef.gov.sg/oms/content/iminde>

f/publications/pointer/journals/2014/v40n3/_jcr_content/imindePars/download/file.res/Binder%20Pointer%20Vol40%20No3.pdf . 2 Oktober 2014, diakses pada 21 Juli, 2018.

penguatan alutsista akan menciptakan *security dilemma* yang tidak akan berakhir. Namun bukan berarti kita abaikan *deterrent effect*, caranya adalah paling tidak sampai garis ZEE serta landas kontinen Indonesia, negara wajib hadir di situ (*state presence*). (Prof Dr Indria Samego: Profesionalisme TNI dengan Reward yang Diberikan oleh Negara, 2016) Hal ini juga didukung dengan pernyataan yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, “Presiden mengatakan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia harus dikuatkan. Jadi ini adalah bagian implementasi dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat pulau-pulau terluar di Indonesia. Jadi intinya adalah kita meningkatkan presensi, baik dari presensi ekonomi, sosial dan lainnya di Natuna.” (Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016 di Kawasan Natuna, 2016) Hal ini membuktikan bahwa pengembangan kapabilitas militer di Natuna serta pelaksanaan latihan puncak Angkasa Yudha di Kepulauan Natuna menjadi bentuk deterensi melawan tekanan dari China di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Peran Latihan Puncak TNI AU Angkasa Yudha dalam menghadapi pelanggaran wilayah oleh China di perairan Kepulauan Natuna adalah sebagai instrumen diplomasi pertahanan Indonesia. Sesuai dengan teori diplomasi pertahanan oleh Gregory Winger dimana diplomasi pertahanan adalah penggunaan instrumen pertahanan dalam masa damai untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Dalam kasus ini Latihan Puncak Angkasa Yudha adalah instrumen pertahanan yang digunakan Indonesia untuk menyampaikan pesan kepada China bahwa Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia yang sah.

Bentuk efek penggentar/daya tangkal yang diberikan oleh pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha di Lanud Ranai, Kepulauan Natuna adalah sebagai pembangunan kapabilitas militer (*capacity building*) Indonesia di perbatasan dan merupakan suatu simbol kehadiran negara (*state presence*) di perbatasan. Hal ini sesuai dengan teori deterensi non-nuklir yang diajukan Mayor Wee Eng Peow dimana salah satu upaya deterensi bagi negara non-nuklir adalah dengan pembangunan kapabilitas militernya. Hal ini juga dibuktikan dengan

penurunan angka pelanggaran wilayah berupa penangkapan ikan secara ilegal oleh China di wilayah perairan Kepulauan Natuna menjadi nol. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa efek deterensi yang dilakukan oleh Indonesia melalui pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha ini berhasil dalam mengurangi praktik pelanggaran wilayah oleh China.

Daftar Pustaka

Buku

McNabb, D. E.. *Research Methods for Political Science*. 2010. New York: M.E. Sharpe Inc.

Artikel/Berita Internet

“Kunjungi Natuna Presiden Jokowi Akan Pimpin Rapat Terbatas di Atas KRI Imam Bonjol” dalam <http://setkab.go.id/kunjungi-natuna-presiden-jokowi-akan-pimpin-rapat-terbatas-di-atas-kri-imam-bonjol/> 23 Juni 2016, diakses pada 17 Desember, 2017.

“Latihan Angkasa Yuda Geser ke Natuna” dalam <https://belitongekspres.co.id/latihan-angkasa-yuda-geser-ke-natuna> 26 September 2016, diakses pada 17 Desember, 2017.

Christou, J. “‘Sovereignty’ versus ‘sovereign rights’” dalam <https://cyprus-mail.com/2015/04/08/sovereignty-versus-sovereign-rights/>. 8 April 2015, diakses pada 17 Desember, 2017.

Kuwado, F. J. “Jokowi ke Natuna, Gelar Ratas di Kapal Perang Imam Bonjol.” dalam

<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/23/07251731/jokowi.ke.natuna.gelar.ratas.di.kapal.perang.imam.bonjol>. 21 Juni 2016, diakses pada 17 Desember, 2017.

Wahyudi Soeriaatmadja. “No Joint War Games in South China Sea” dalam <https://www.straitstimes.com/asia/no-joint-war-games-in-south-china-sea>. 16 Oktober 2016, diakses pada 17 Desember, 2017.

Dokumen Resmi

“Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan” dalam <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/u-u-2009-45.pdf> 2010, diakses pada 17 Desember, 2017.

Jurnal/Publikasi Ilmiah

Peow, M. W. “The Viability of Deterrence Strategies by Non-Nuclear States.” *Pointer - Journal of the Singapore Armed Forces*, Vol. 40, hlm. 1-7. dalam https://www.mindef.gov.sg/oms/content/imindef/publications/pointer/journals/2014/v40n3/_jcr_content/imindefPars/download/file.res/Binder%20Pointer%20Vol40%20No3.pdf. 2 Oktober 2014, diakses pada 21 Juli, 2018

Publikasi Lain

Akhmad Hanan. “Implementasi Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Agresifitas China di Laut China Selatan Guna Mendukung Pembangunan Pertahanan Republik Indonesia.” 11 November 2018.

Wibowo, L. S. “Latihan TNI AU Angkasa Yudha '16 Bukan Unjuk Kekuatan Militer.” *Majalah Kedirgantaraan Angkatan Udara Suara Angkasa* edisi Oktober, 2016. hal. 2-7.